

## ABSTRACT

Auction as an institution has been known during the Dutch East Indies government, namely since 1908 when the *Vendu Reglement* was announced in *Staatsblad* 1908 number 189 and *Vendu Instructie* was announced in *Staatsblad* 1908 number 190. Since the entry into force of the *Vendu reglement*, the auction was favored by the public because in the auction of goods sold more and varied, so that buyers are free to choose goods. Auction or sale in public, give some opinion of the benefits or goodness compared to other sales that is fair, fast, safe to realize high prices and provide legal certainty. In the current era, many goods are confiscated from various institutions, these items can be confiscated. The origin of the item was from several confiscations, namely confiscation of court, confiscation of tax, confiscation of customs and excise as well as police confiscation. The goods will then be auctioned through the nearest State Financial Service and Auction Office and the results of the auction will be fully submitted to the state. With this background, the writer is interested in taking the title "**STRENGTH OF LEGAL DEBT TO AUCTION TOWARDS GOODS THAT ARE LOADED BY SITA BASED ON REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER 27 / PMK.06 / 2016 IN THE CITY OF SEMARANG**" by raising the formulation of the problem as follows (1) goods that are confiscated based on the Minister of Finance Regulation number 27 / PMK.6 / 2016 in Semarang City (2) What is the legal force of the auction treaty on goods confiscated based on the Minister of Finance Regulation number 27 / PMK.6 / 2016 in Semarang City. This research was made using the sociological juridical method, and the location of the research that the author took was at the Office of State Assets and Auction Services in the Semarang area. The results of the research are known to the auction implementation process through several stages, namely the application, implementation, bidding, payment, submission of documents, making the minutes of the treatise auction. The Deed of Minutes of Auction consists of the body of the deed, the middle of the deed and the leg of the deed which contains the day, date, type of item, address of the seller, as well as the items sold. Auction treatise deed is an authentic deed drawn up by auction officials and uses statutory regulations so this auction treatise deed has permanent legal force if there are problems in the future.

**Keywords:** *Legal Strength, Deed of Auction Minutes, Confiscated Goods*

## ABSTRAK

Lelang sebagai suatu kelembagaan telah dikenal saat pemerintahan Hindia Belanda yaitu sejak tahun 1908 pada saat *Vendu Reglement* diumumkan dalam Staatsblad 1908 nomor 189 dan *Vendu Instructie* diumumkan dalam Staatsblad 1908 nomor 190. Sejak berlakunya *Vendu reglement* tersebut, pelelangan digemari oleh masyarakat karena dalam pelelangan barang yang dijual lebih banyak dan variatif, sehingga pembeli leluasa untuk memilih barang. Lelang atau penjualan dimuka umum, memberikan beberapa pendapat manfaat atau kebaikan dibandingkan penjualan yang lainnya yaitu adil, cepat, aman mewujudkan harga yang tinggi dan memberikan kepastian hukum. Di era sekarang banyak barang yang terbebani sita dari berbagai lembaga, barang tersebut didapat dari penyitaan. Asal mula barang itu dari beberapa penyitaan yaitu sita pengadilan, sita pajak, sita Bea cukai, serta sita kepolisian. Barang tersebut selanjutnya akan dilelang dengan melalui Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang terdekat lalu hasilnya dari pelelangan akan diserahkan sepenuhnya untuk negara. Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul **“KEKUATAN HUKUM AKTA RISALAH LELANG TERHADAP BARANG YANG TERBEBAN SITA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.06/2016 DI KOTA SEMARANG”** dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana proses pelaksanaan lelang terhadap barang yang terbebani sita berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 27/PMK.6/2016 di Kota Semarang (2) Bagaimana kekuatan hukum dari risalah lelang pada barang yang terbebani sita berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 27/PMK.6/2016 di Kota Semarang. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, dan lokasi penelitian yang penulis ambil yaitu di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang wilayah Semarang. Hasil penelitian diketahui proses pelaksanaan lelang melalui beberapa tahap yaitu permohonan, pelaksanaan, penawaran, pembayaran, penyerahan dokumen, pembuatan akta risalah lelang. Akta Risalah Lelang terdiri dari badan akta, tangan akta dan kaki akta yang didalamnya berisi tentang hari, tanggal, tipe barang, alamat penjual, serta barang yang terjual. Akta Risalah Lelang merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat lelang dan menggunakan peraturan perundang-undang jadi akta risalah lelang ini mempunyai kekuatan hukum tetap apabila ada permasalahan di kemudian hari.

**Kata Kunci:** *Kekuatan Hukum, Akta Risalah Lelang, Barang Yang Terbebani Sita*